

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA KENDARI MENURUT PENGELUARAN

2017 - 2021



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA KENDARI MENURUT PENGELUARAN

2017 - 2021



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA KENDARI
MENURUT PENGELUARAN
2017-2021**

ISSN : 2597-7678
Nomor Publikasi : 74710.2211
Katalog : 9302020.7471

Ukuran Buku : 21,5 x 28,5 cm
Jumlah Halaman : xiii + 73 halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Kendari

Gambar Kover oleh : Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Kendari

Ilustrasi Kover :

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Kota Kendari

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



KATA PENGANTAR

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Net Ekspor (ekspor dikurangi impor). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kendari, April 2022

Badan Pusat Statistik
Kota Kendari
Kepala,

Ir. Martini, MS.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENJELASAN UMUM	1
1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	3
1.2. PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB	6
BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	11
2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)	13
2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)	14
2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	15
2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	16
2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)	17
2.6. EKSPOR IMPOR LUAR NEGERI	18
2.7. EKSPOR IMPOR ANTAR DAERAH	18
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN	20
3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA KENDARI MENURUT PENGELUARAN	22
3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	26
3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	28
3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	29
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA KENDARI TAHUN 2017 – 2021	36
4.1. PDRB (NOMINAL)	38
4.2. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP NET EKSPOR	39
4.3. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB	40
4.4. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB	40
4.5. PERBANDINGAN NET EKSPOR TERHADAP PMTB	42

BAB V PENUTUP	46
BAB VI LAMPIRAN TABEL.....	50
BAB VII DAFTAR PUSTAKA.....	57

<https://kendarikota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kendari Tahun 2017-2021 (Juta Rp)	22
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Kendari Tahun 2017-2021 (Juta Rp)	23
Tabel 3. Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Kendari Tahun 2017-2021 (Persen)	24
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Kendari, Tahun 2017-2021 (Persen)	25
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Kendari, Tahun 2017-2021 (Persen)	26
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Kendari, Tahun 2017-2021	27
Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Kendari, Tahun 2017-2021	29
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Kendari, Tahun 2017-2021	30
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Kendari, Tahun 2017-2021	32
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Kendari, Tahun 2017-2021	33
Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Kendari, Tahun 2017-2021	35
Tabel 12. PDRB dan PDRB Perkapita Kota Kendari, Tahun 2017-2021	38
Tabel 13. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Net Ekspor Tahun 2017-2021	39
Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2017-2021	40
Tabel 15. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Kendari, Tahun 2017-2021	41
Tabel 16. Rasio Net Ekspor terhadap PMTB (ADH Berlaku) Tahun 2017-2021	42
Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio Kota Kendari, Tahun 2017-2021	43

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Kendari, Tahun 2017 – 2021 (Milyar Rp)	23
Grafik 2. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Kendari, Tahun 2017-2021 (Persen).....	28
Grafik 3. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Kendari, Tahun 2017-2021.....	31

<https://kendarikota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

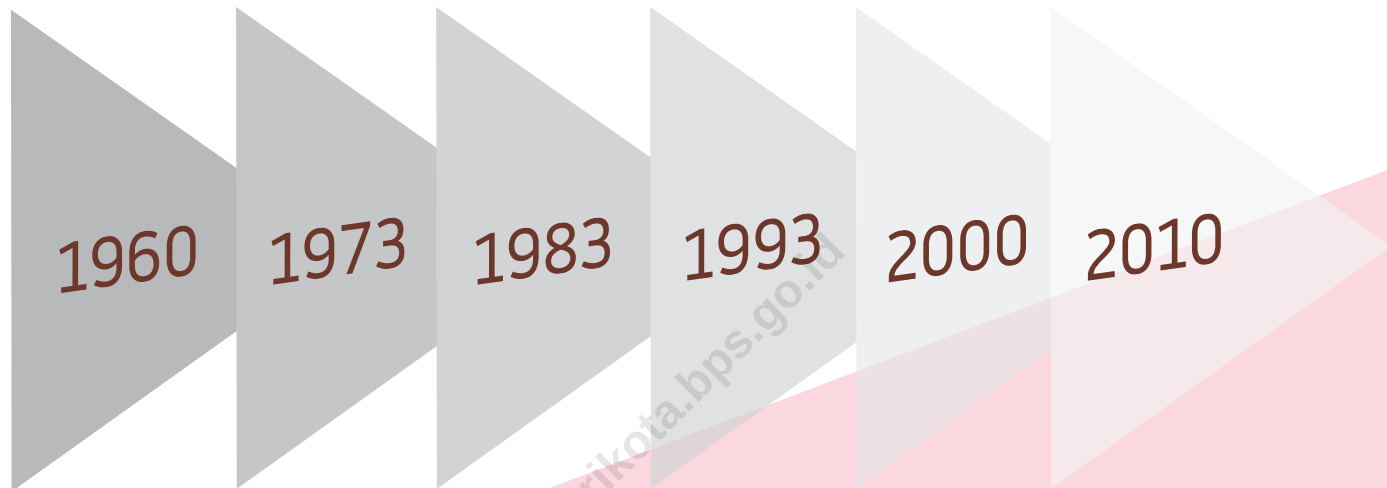
Lampiran 1. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	52
Lampiran 2. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan	53
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Persen). 54	
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Indeks Harga implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)	55

<https://kendarikota.bps.go.id>

Penjelasan Umum

1

Perubahan Tahun Dasar



PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat.

Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).



1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, serta Net Ekspor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para

pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + \text{Net Ekspor}$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
Net Ekspor	= Ekspor - Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

investasi fisik, maka net ekspor (selisih antara ekspor dengan impor) menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*).

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2. PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun

komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

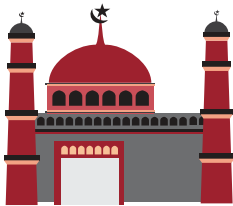
PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

KOMPONEN PENGELUARAN



PK-RT

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga



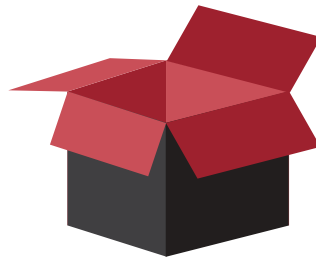
LNPRT

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Tumah Tangga



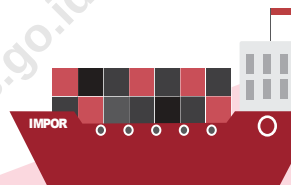
PK-P

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

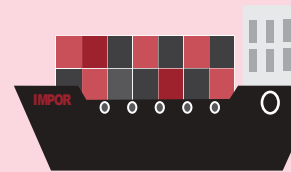


PI

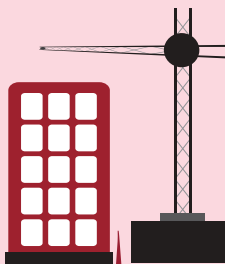
Perubahan Inventori



Ekspor dan Impor Luar Negeri

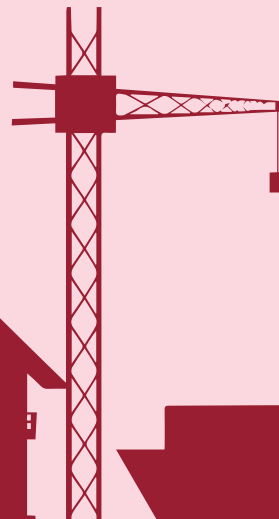


Ekspor dan Impor Antar Daerah



PMTB

Pembentukan Modal Tetap Bruto



2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga dipandang sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

PKRT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk konsumsi; dikurangi hasil penjualan netto barang bekas atau afkiran pada periode waktu tertentu.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan. Barang dan jasa yang dikonsumsi antara lain dalam bentuk:

- makanan dan minuman, baik bahan makanan maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- barang tahan lama, seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transport, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, ongkos pembantu rumah tangga;
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di luar negeri termasuk sebagai konsumsi rumah tangga dan

diperlakukan sebagai transaksi impor; sedangkan pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lain diperlakukan sebagai investasi barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang diperhitungkan adalah ongkos sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga tidak termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh pengeluaran yang dimaksud antara lain adalah pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Demikian halnya pengeluaran rumah tangga untuk keperluan transfer dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh institusi rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*).

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencakup berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip bertujuan untuk biaya operasional atau pengeluaran dalam melayani rumah tangga. Pengeluaran konsumsi LNPRT digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi akhir yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan lembaga. LNPRT merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Sebagian besar kegiatan lembaga

bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*). LNPRT merupakan bagian dari Lembaga NonProfit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai dengan fungsinya ada LNP yang melayani rumah tangga, dan ada juga yang melayani bukan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud LNPRT adalah LNP yang khusus melayani rumah tangga.

Dalam SNA'93, LNPRT diperlakukan sebagai sektor institusi (pelaku ekonomi) tersendiri di luar institusi rumah tangga, pemerintah, korporasi, dan luar negeri atau luar wilayah. Dari penggolongan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan lembaga nonprofit dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu lembaga nonprofit yang menghasilkan jasa komersial dan lembaga nonprofit yang menghasilkan jasa non-komersial.

Lingkup LNP yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi (Orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olah raga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota; b. PK-Pemerintah Provinsi yang berada di kabupaten/kota yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang ada di Kabupaten/kota; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau

barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

Inventori merupakan persediaan barang (bahan baku, barang jadi dan barang setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Dalam konteks mikro (perusahaan), transaksi inventori menjelaskan informasi tentang posisi cadangan atau persediaan barang jadi maupun barang dalam pengerjaan (setengah jadi) perusahaan pada satu saat, yang datanya disajikan dalam laporan neraca akhir tahun, selain itu di dalamnya termasuk juga barang dagangan dan barang dalam perjalanan. Dalam laporan tersebut inventori dicatat sebagai bagian dari harta lancar (*current asset*) pada sisi kiri neraca yang merupakan bagian dari aset/kekayaan perusahaan. Lazimnya data tersebut disajikan secara agregat (tidak dirinci menurut jenis inventori) bersama-sama dengan komponen harta lancar lainnya, di dalamnya termasuk juga nilai penyisihan atas inventori yang rusak atau usang. Selain produsen (*inventory holder*) penguasa inventori lainnya adalah sektor perdagangan, pemerintah dan rumah tangga. Masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda dalam melakukan penimbunan barang-barang inventori.

Bagi produsen, keberadaan inventori ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan proses produksinya, sehingga diperlukan pencadangan baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Alasan lain karena ketidakpastian pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya

bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik); komoditas tersebut diantaranya meliputi komoditas beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Secara makro, di dalam statistik neraca nasional inventori dicakup sebagai bagian dari pembentukan modal atau dikenal sebagai inventasi fisik di satu wilayah. Tepatnya inventori tersebut menjelaskan tentang porsi dari investasi yang telah direalisasikan dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi pada berbagai kegiatan ekonomi produksi. Karena nyatanya sebagian dari investasi tersebut memang direalisasikan untuk pengadaan berbagai keperluan bahan baku maupun bahan penolong/pembantu. Dengan demikian maka tersedianya data tentang inventori akan menjadi informasi yang cukup penting bagi analisis investasi khususnya bagi komponen pembentukan modal, meskipun kontribusinya dalam perekonomian tidaklah terlalu besar.

2.6. EKSPOR IMPOR LUAR NEGERI

Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB Penggunaan kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah kabupaten/kota terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Transaksi **ekspor barang** didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah kabupaten/kota terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Sebaliknya, **impor barang** didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*) terhadap residen suatu wilayah kabupaten/kota.

2.7. EKSPOR IMPOR ANTAR DAERAH

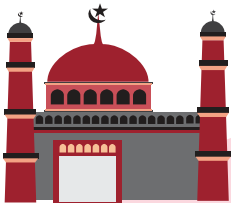
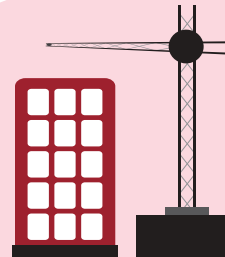
Menurut sejarah, kegiatan ekspor-impor antar daerah di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Produksi barang dan jasa antar wilayah yang saling melengkapi menjadi faktor utama kegiatan transaksi ini. Kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi seluruhnya di suatu wilayah perekonomian akan diisi oleh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah perekonomian yang lain. Pada sisi yang lain, perekonomian yang memproduksi barang dan jasa yang melebihi kebutuhannya juga terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayahnya.

Dengan semakin berkembangnya jaman membuat produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa menjadi semakin meningkat. Perkembangan yang terjadi pada sarana transportasi dan komunikasi telah semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi semakin lancar. Kondisi tersebut mendorong aktifitas ekspor-impor barang dan jasa antara daerah menjadi semakin berkembang.

Cakupan transaksi ekspor-impor barang dan jasa antar daerah juga sama dengan cakupan transaksi ekspor-impor luar negeri, yang membedakan hanyalah mitra transaksinya. Dalam ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, yang menjadi mitra adalah pelaku ekonomi yang merupakan residen luar negeri, sedangkan dalam ekspor-impor antar daerah yang menjadi mitra adalah pelaku ekonomi yang merupakan residen kabupaten lain di Indonesia, baik dalam satu provinsi maupun antar kabupaten/kota diluar provinsi.

Penghitungan ekspor-impor barang dan jasa antar kabupaten dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu memanfaatkan sifat keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) komoditas barang dan jasa di setiap pasar. Metode tersebut adalah kombinasi antara *commodity balance* dan *cross hauling*. Kombinasi kedua metode tersebut akan menghasilkan nilai ekspor-impor barang dan jasa yang terjadi di suatu kabupaten. Nilai ekspor-impor barang dan jasa antar kabupaten diperoleh dengan cara mengurangkan hasil penghitungan kombinasi kedua metode tersebut dengan hasil penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri.

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran KOTA KENDARI, TAHUN 2021**

**2,29%**Pengeluaran Konsumsi
Akhir Rumah Tangga**3,96%**Pengeluaran Konsumsi
Akhir Pemerintah**0,53%**Pengeluaran Konsumsi Akhir
Lembaga Non Profit
yang Melayani Rumah Tangga**4,91%**Pembentukan Modal
Tetap Bruto

** Angka Sangat Sementara



3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA KENDARI MENURUT PENGELUARAN

Ekonomi Kota Kendari tahun 2021 kembali membaik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Perekonomian yang semakin membaik terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali Perubahan Inventori dan Net Ekspor. Perubahan untuk masing-masing komponen pembentuk PDRB Pengeluaran digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan ADH Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Kendari Tahun 2017-2021
(Juta Rp)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10.274.067,15	11.238.384,42	12.284.748,05	12.372.526,04	12.936.486,79
2. Konsumsi LNPR	173.511,30	193.270,91	217.429,77	208.800,38	212.694,84
3. Konsumsi Pemerintah	4.861.108,95	5.364.209,61	5.853.568,25	6.172.828,69	6.512.703,92
4. PMTB	7.906.623,53	8.665.214,15	9.318.543,26	9.189.371,73	10.028.064,27
5. Perubahan Inventori	(97.376,17)	(268.567,97)	(498.552,30)	(241.151,76)	(325.130,76)
6. Net Ekspor	(4.453.797,75)	(4.906.784,70)	(5.022.230,39)	(5.656.677,12)	(5.694.049,78)
Total PDRB	18.664.137,00	20.285.726,42	22.153.506,64	22.045.697,95	23.670.769,29

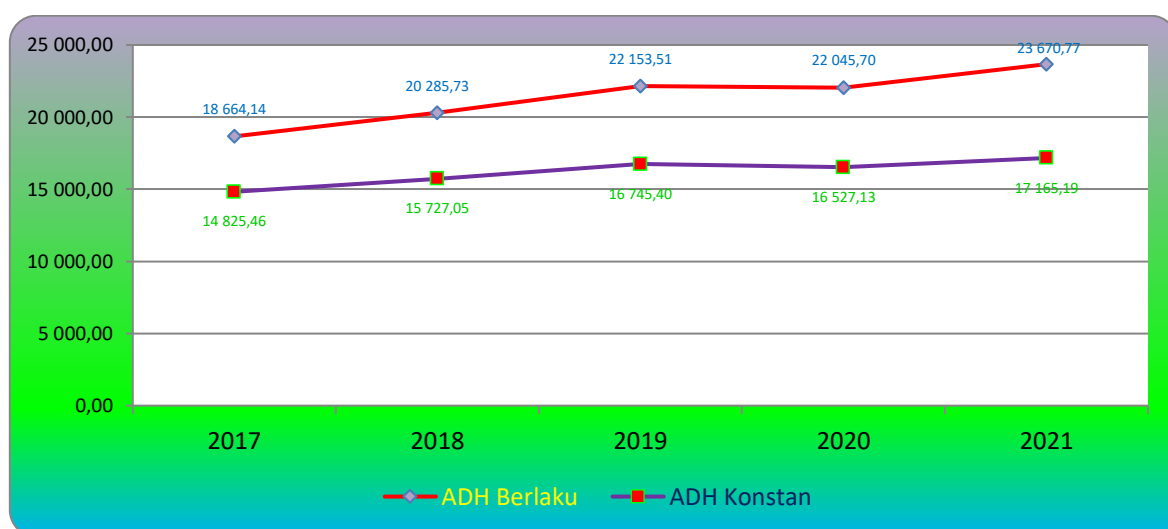
PDRB ADH Berlaku dan Konstan secara bersama menunjukkan Komponen Pengeluaran Net Ekspor mengalami kontraksi dan memberikan indikasi bahwa kondisi pandemi tidak mengubah pola konsumsi masyarakat untuk tidak melakukan impor barang dan jasa dari luar Kota Kendari. Kontraksi berikutnya berasal dari Komponen Perubahan Inventori yang menunjukkan berkurangnya realisasi investasi dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong sepanjang tahun 2021, menyebarnya wabah covid-19 telah menimbulkan ketidakpastian bagi aktivitas pembentukan modal. Tetapi disamping itu, Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil yang cukup besar sehingga menjadi faktor penambahan utama dalam pembentukan PDRB Kota Kendari.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kota Kendari Tahun 2017-2021
(Juta Rp)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7.590.334,60	8.097.389,11	8.640.022,18	8.621.578,37	8.818.855,06
2. Konsumsi LNPRT	139.150,78	152.564,80	167.317,82	157.808,35	158.648,90
3. Konsumsi Pemerintah	3.635.384,12	3.789.359,41	4.030.732,84	4.154.531,81	4.319.061,37
4. PMTB	6.552.764,42	6.923.197,30	7.232.365,35	7.065.559,47	7.412.405,31
5. Perubahan Inventori	(28.845,05)	(196.643,70)	(335.163,16)	(130.803,00)	(139.959,21)
6. Net Ekspor	(3.063.328,98)	(3.038.811,96)	(2.989.876,24)	(3.341.463,81)	(3.403.826,32)
Total PDRB	14.825.459,89	15.727.054,97	16.745.398,79	16.527.211,18	17.165.185,11

Perubahan PDRB Kota Kendari ADH Berlaku dan Konstan selama kurun waktu 2017-2021 ditampilkan pada Grafik 1. Tampak bahwa meskipun pandemi masih terjadi di tahun 2021, namun PDRB terendah terjadi di tahun 2017. Kebijakan pemerintah melonggarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi faktor penting nilai PDRB Kota Kendari tidak turun lebih dalam.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kota Kendari, Tahun 2017 – 2021 (Milyar Rp)**



Dari Grafik 1, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB ADH Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB ADH Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADH Berlaku. Sebaliknya pada PDRB ADH Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Kendari Tahun 2017-2021
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	55,05	55,40	55,45	56,12	54,65
2. Konsumsi LNPRT	0,93	0,95	0,98	0,95	0,90
3. Konsumsi Pemerintah	26,05	26,44	26,42	28,00	27,51
4. PMTB	42,36	42,72	42,06	41,68	42,37
5. Perubahan Inventori	-0,52	-1,32	-2,25	-1,09	-1,37
6. Net Ekspor	- 23,87	- 24,19	- 22,67	- 25,66	-24,06
Distribusi PDRB ADH Berlaku	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2017 – 2021, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Meskipun ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, namun secara total masih belum mengurangi dominasi impor untuk memenuhi permintaan domestik. Hal tersebut dilihat dari net ekspor yang terus bernilai negatif diatas 20 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi diatas 40 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 26,05 – 28,00 persen, dengan tren yang menunjukkan penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah

dalam menyerap produk domestik di Kota Kendari mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Kendari, Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,45	6,68	6,70	-0,21	2,29
2. Konsumsi LNPRT	9,99	9,64	9,67	-5,68	0,53
3. Konsumsi Pemerintah	9,98	4,24	6,37	3,07	3,96
4. PMTB	7,75	5,65	4,47	-2,31	4,91
5. Perubahan Inventori	-26,16	581,72	70,44	-60,97	7,00
6. Net Ekspor	-6,45	13,58	9,91	-7,34	12,54
Pertumbuhan PDRB	6,38	6,08	6,48	-1,30	3,86

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari dari tahun 2017 s.d 2021 secara rata-rata mencapai 4,30 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 6,48 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-1,30 persen). Kebijakan negara-negara di dunia termasuk pemerintah pusat dalam membatasi pencegahan dan penyebaran Covid-19 menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi yang negatif tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan yakni sebesar 3,86 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 aktivitas ekonomi kembali membaik dimana masyarakat sudah dapat melaksanakan aktivitas ekonomi dengan keadaan normal kembali.

Sementara itu, indeks implisit PDRB pada tabel 5 menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen. Baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) secara bersama menunjukkan peningkatan dalam periode 2017-2021. Indeks implisit PDRB

yang disajikan pada Tabel 5 juga berarti adanya kecenderungan kenaikan harga dalam lima tahun terakhir di Kota Kendari.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran,
Kota Kendari, Tahun 2017-2021
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	135,36	138,79	142,18	143,51	146,69
2. Konsumsi LNPRT	124,69	126,68	129,95	132,31	134,07
3. Konsumsi Pemerintah	133,72	141,56	145,22	148,58	150,79
4. PMTB	120,66	125,16	128,85	130,06	135,29
5. Perubahan Inventori	337,58	136,58	148,75	184,36	232,3
6. Net Ekspor	145,39	161,47	167,97	169,29	167,28
Indeks Implisit PDRB	125,89	128,99	132,30	133,39	137,90

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB Menurut Pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, di mana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017 – 2021 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan secara nominal (ADH Berlaku) sejalan dengan dinamika jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga.

Secara riil PDRB ADH Konstan mengalami kenaikan ditahun 2021. Kenaikan jumlah penduduk sejalan dengan dorongan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena kondisi yang sudah mulai normal lagi dibandingkan pada tahun 2020 yang menjadi awal pandemi. Perilaku rumah tangga yang mulai kembali normal menjadi faktor penyebab kenaikan PK-RT ADH Konstan ditahun 2021.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Kendari, Tahun 2017-2021

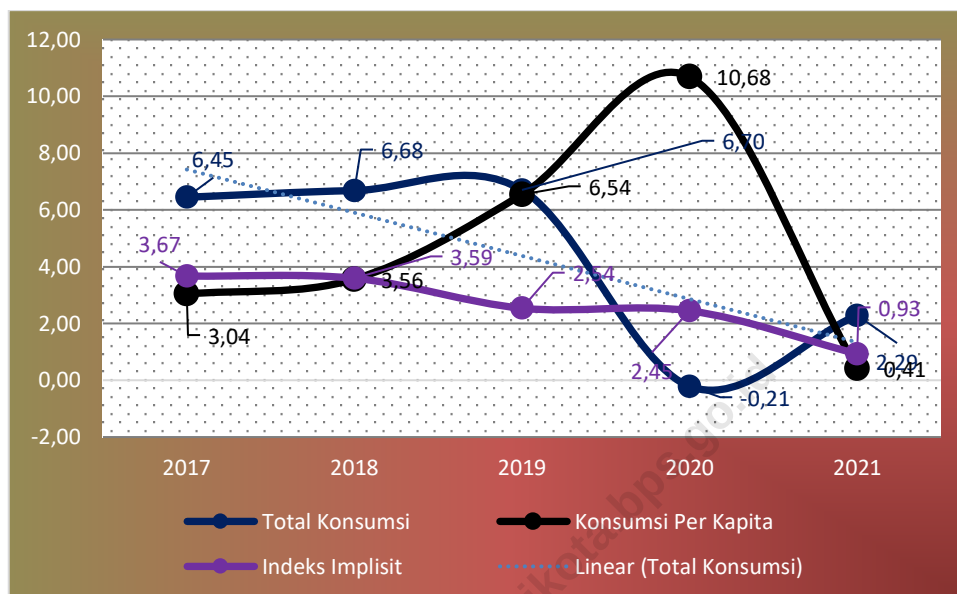
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Juta Rp) :					
a. ADH Berlaku	10 274 067,15	11 238 384,42	12 284 748,05	12 372 526,04	12 936 486,79
b. ADH Konstan	7 590 334,60	8 097 389,11	8 640 022,18	8 621 578,37	8 818 855,06
Proporsi terhadap PDRB (% ADH Berlaku)	55,05	55,40	55,45	56,12	54,65
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Rupiah) :					
a. ADH Berlaku	116 875 607,41	124 105 620,01	135 457 190,38	151 319 970,12	155 313 013,02
b. ADH Konstan	86 346 035,58	89 419 569,42	95 268 793,84	105 444 674,60	105 877 505,48
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Rupiah) :					
a. ADH Berlaku	27 713 221,41	29 448 532,13	32 165 425,72	35 983 591,22	36 933 216,07
b. ADH Konstan	20 474 133,61	21 218 016,26	22 622 359,90	25 074 536,19	25 177 521,90
Pertumbuhan (%) :					
a. Total konsumsi RT	6,45	6,68	6,70	- 0,21	2,29
b. Perkapita	3,18	3,63	6,62	10,84	0,41
Jumlah RT (ribu)	87 906,00	90 555,00	90 691,00	81 764,00	83 293,00
Jumlah penduduk (jiwa)	370 728,00	381 628,00	381 924,00	343 838,00	350 267,00

Sedikit berbeda dengan total konsumsi rumah, rata-rata konsumsi per rumah tangga mengalami penurunan ditahun 2020 baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan. Pada tahun 2020, secara umum setiap rumah tangga di Kota Kendari menghabiskan dana sekitar 151,31 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, dsb.). Pandemi menjadi faktor utama menurunnya konsumsi rumah tangga. Banyak pekerja swasta yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan karena usaha yang tutup sementara atau bahkan permanen karena ketidakpastian ekonomi dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat dan daerah.

Perkiraan ADH Konstan 2010 memberikan pertumbuhan total konsumsi rumah tangga ditahun 2021 sebesar 2,29 persen dimana pertumbuhannya semakin meningkat jika dibandingkan tahun 2020 walaupun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sebelum tahun 2020. Rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan pertumbuhan positif dibanding pada tahun 2020. Secara keseluruhan, pertumbuhan perkapita

menunjukkan pola penurunan konsumsi yang memungkinkan akibat masih berpengaruhnya dampak pandemi bagi masyarakat.

Grafik 2. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Kendari, Tahun 2017-2021 (Persen)



Pertumbuhan harga secara implisit untuk konsumsi akhir rumah tangga disajikan pada grafik 2 memperlihatkan kecenderungan penurunan terjadi setiap tahun. Hal itu mengindikasikan bahwa pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahun tetapi dengan pertumbuhan yang lambat dalam periode lima tahun terakhir terlebih saat pandemi terjadi.

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB Menurut Pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah masih dapat terus ditingkatkan. Proporsi pengeluaran LNPRT terhadap PDRB cukup berfluktuasi, yakni tercatat 0,93 persen tahun 2017; 0,95 persen tahun 2018; 1,02 persen tahun 2019; 0,97 persen tahun 2020; dan 0,90 persen tahun 2021. Tren peningkatan komponen ini yang ditunjukkan pada

tahun-tahun sebelumnya cukup terganggu oleh pandemi. Meskipun proporsinya terlihat kecil, namun keberadaan LNPRT memiliki andil menjaga pertumbuhan PDRB Kota Kendari tidak terkontaksi lebih dalam ditahun 2021.

**Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kota Kendari, Tahun 2017-2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Juta RP) :					
a. ADH Berlaku	173.511,30	193.270,91	217.429,77	208.800,38	212.694,84
b. ADH Konstan	139.150,78	152.564,80	167.317,82	157.808,35	158.648,90
Proporsi terhadap PDRB (% ADH Berlaku) :	0,93	0,95	1,02	0,97	0,90

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADH Berlaku tercatat sebesar 4,86 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2021 nilainya mencapai 6,51 triliun rupiah (tabel 8). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADH Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Konsumsi Akhir Pemerintah menempati urutan ke-3 pembentuk PDRB Kota Kendari dan memegang peranan penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Strateginya, pengeluaran pemerintah yang tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan lebih tinggi untuk semua pendapatan. Pendapatan yang tinggi diharapkan dapat menaikkan konsumsi dan tingginya konsumsi inilah yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.

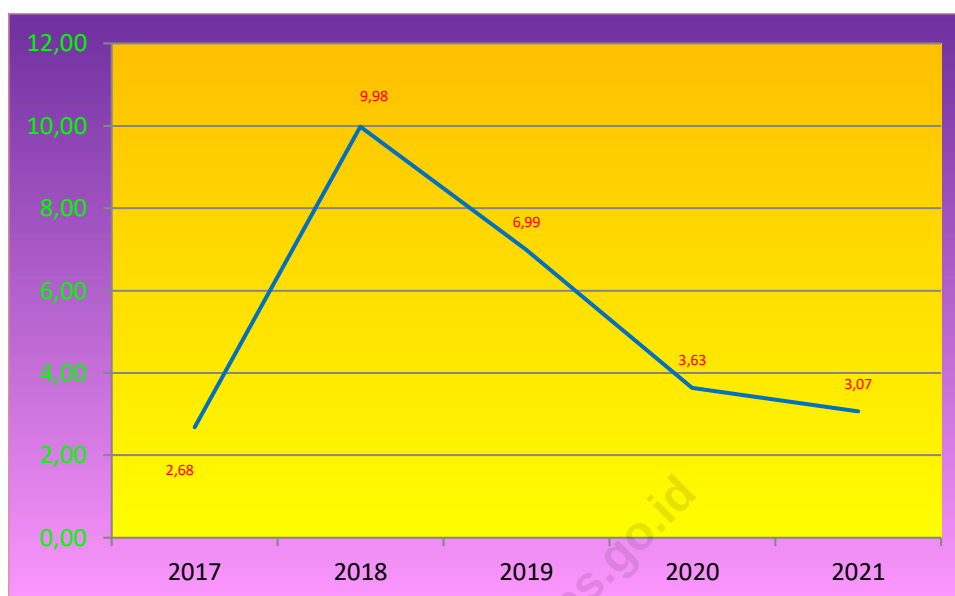
**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kota Kendari, Tahun 2017-2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Juta Rp) :					
a. ADH Berlaku	4 861 108,95	5 364 209,61	5 853 568,25	6 172 828,69	6512703,92
b. ADH Konstan	3 635 384,12	3 789 359,41	4 030 732,84	4 154 531,81	4319061,37
Proporsi terhadap PDRB (% ADH Berlaku) :	26,06	26,44	26,42	28,00	27,51
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp) :					
a. ADH Berlaku	13 112,33	14 056,12	15 326,53	17 952,72	18 593,54
b. ADH Konstan	9 806,07	9 929,46	10 553,76	12 082,82	12 330,77
Konsumsi Pemerintah per pegawai (Ribu Rp) :					
a. ADH Berlaku	241 665,87	269 666,68	295 515,36	316 994,23	347 715,11
b. ADH Konstan	180 730,01	190 496,65	203 490,15	213 348,32	230 595,91
Pertumbuhan (%)					
a. Total konsumsi	9,98	4,24	6,37	3,07	3,96
b. Konsumsi perkapita	6,61	1,26	6,29	14,49	2,05
Jumlah Pegawai Pemerintah (orang)	20 115	19 892	19 808	19 473	18 730,00
Jumlah Penduduk (orang)	370 728	381 628	381 924	343 838	350 267,00

Ket : * Angka Sementara , ** Angka Sangat Sementara

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah acap kali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per-kapita ADH Berlaku sebesar 13,11 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, sampai mencapai 18,59 juta rupiah pada tahun 2021. Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADH Konstan (2010) juga menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas.

Grafik 3. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Kendari, Tahun 2017-2021 (persen)



Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan perkembangan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Secara riil pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dalam periode tahun 2017 sampai 2021. Tahun 2017 terjadi pertumbuhan 9,98 persen sekaligus tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Setelah tahun 2017, pertumbuhannya terus melambat hingga mencapai tahun 2020 dan kembali naik lagi pada tahun 2021 yakni 3,96 persen. Lemahnya daya serap anggaran bisa menjadi faktor penyebab melambatnya pertumbuhan komponen ini dalam tiga tahun berturut-turut.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB Menurut Pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik), atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai

investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB dalam struktur pembentuk PDRB Kota Kendari menempati posisi kedua terbesar setelah Konsumsi Akhir Rumah Tangga. Sejalan dengan itu, pertumbuhannya ditahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,91 persen. Artinya, proses investasi fisik sepanjang 2021 kembali membaik setelah terjadinya pandemi pada tahun 2020.

**Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kota Kendari, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Juta Rp) :					
a. ADH Berlaku	7 906 623,53	8 665 214,15	9 318 543,26	9 189 371,73	10 028 064,27
b. ADH Konstan	6 552 764,42	6 923 197,30	7 232 365,35	7 065 559,47	7 412 405,31
Proporsi terhadap PDRB (% ADH Berlaku)	42,36	42,72	42,06	41,68	42,37
Struktur PMTB :					
a. Bangunan	61,56	62,29	62,55	63,36	65,87
b. Non Bangunan	38,44	37,71	37,45	36,64	34,13
Pertumbuhan (%) :					
a. Bangunan	8,14	6,67	4,83	- 1,01	6,92
b. Non Bangunan	7,11	3,94	3,83	- 4,56	1,28
Total PMTB	7,75	5,65	4,47	- 2,31	4,91

Tabel 9 memperlihatkan pertumbuhan Total PMTB ditahun 2021 kembali membaik dibanding tahun 2020. Pertumbuhan PMTB Bangunan menjadi sangat tinggi dibanding tahun 2020 yaitu pada angka 4,91 persen, menunjukkan bahwa pada tahun tersebut aset tetap berupa bangunan pada suatu unit produksi mengalami penambahan yang lebih banyak. Mulai normalnya keadaan ekonomi yang sebelumnya memburuk akibat pandemi menjadikan tahun 2021 menjadi waktu yang tepat untuk memulai kembali berinvestasi.

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini dapat berupa penambahan atau pengurangan persediaan. Dari sisi penghitungan, apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Kendari, Tahun 2017-2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori (Juta Rp) :					
a. ADH Berlaku	(97 376,17)	(268 567,97)	(498 552,30)	(241 151,76)	(325 130,76)
b. ADH Konstan	(28 845,05)	(196 643,70)	(335 163,16)	(130 803,00)	(139 959,21)
Proporsi terhadap PDRB (% ADH Berlaku)	- 0,52	- 1,32	- 2,25	- 1,09	-1,37

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Berdasarkan proporsinya terhadap pembentukan PDRB Kota Kendari, perubahan inventori dapat dikatakan relatif kecil yakni masih

dibawah 3 persen. Kelemahan pencatatan dan perekaman perubahan inventori menjadi faktor penting penyebab rendahnya proporsi komponen ini terhadap pembentukan PDRB Kota Kendari.

3.7. PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak di luar wilayah domestik, yakni antar daerah maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Kendari. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Secara total, net ekspor Kota Kendari mengalami kecenderungan menurun selama lima tahun terakhir. Net ekspor ADH Berlaku secara berurutan tercatat negatif 4,45 triliun rupiah ditahun 2017 menjadi negatif 5,69 triliun rupiah ditahun 2021. Sejalan dengan itu, proporsi net ekspor sebagai faktor pengurang dalam struktur PDRB Kota Kendari juga cukup besar yakni lebih dari 20 persen selama lima tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa suplai produk di wilayah ekonomi Kota Kendari masih berasal dari dominasi non residen.

**Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kota Kendari, Tahun 2017-2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor (Juta Rp) :					
a. ADH Berlaku	(4 453 797,75)	(4 906 784.70)	(5 022 230,39)	(5 656 677,12)	(5 694 049,78)
b. ADH Konstan	(3 063 328,98)	(3 038 811.96)	(2 989 876,24)	(3 341 463,81)	(3 403 826,32)
Proporsi terhadap PDRB (% ADH Berlaku)	- 23,87	- 24,19	- 22,67	- 25,66	- 24,06

Ket : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Makin melebarnya net ekspor yang terbentuk setiap tahun menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Kendari terhadap ekonomi atau produk dari daerah lain maupun dari negara lain (impor). Komponen impor dimaksud adalah pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Kendari, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA KENDARI TAHUN 2015 – 2019

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
KOTA KENDARI, TAHUN 2021**



ADHK
ATAS DASAR HARGA KONSTAN



“ PDRB perkapita Kota Kendari menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk ”

** Angka Sangat Sementara



4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi (nilai tambah), pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 12. PDRB dan PDRB Perkapita
Kota Kendari, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp) :					
a. ADH Berlaku	18 664 137,00	20 285 726,42	22 153 506,64	22 045 697,95	23 670 769,29
b. ADH Konstan	14 825 459,89	15 727 054,97	16 745 398,79	16 527 126,18	17 165 185,11
PDRB Perkapita (Rp) :					
a. ADH Berlaku	50 344 557,19	53 155 760,12	58 005 013,15	64 116 525,66	67 579 216,10
b. ADH Konstan	39 990 127,23	41 210 432,59	43 844 845,55	48 066 607,48	49 006 001,46
Pertumbuhan PDRB Perkapita (% ADH Konstan)	3,12	3,05	6,39	9,63	1,95
Jumlah Penduduk (Jiwa)	370 728	381 628	381 924	343 838	350 267
Pertumbuhan (%)	3,16	2,94	0,08	- 9,97	1,87

PDRB Perkapita Kota Kendari menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 (tabel 12) seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Kendari rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Namun, ditahun 2020 angka PDRB Perkapita baik menurut ADH Berlaku maupun ADH Konstan secara bersama-sama mengalami penurunan. Tetapi pertumbuhannya kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 baik pada angka PDRB Perkapita ADH Berlaku

maupun ADH Konstan. Artinya, pada tahun tersebut nilai tambah ekonomi perkapita mampu tercapai kembali setelah terjadinya penurunan pada tahun 2020.

Sementara itu pertumbuhan PDRB Perkapita ditahun 2021 juga kembali membaik dengan angka 1,87 persen dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan drastis akibat pandemi. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,87 persen yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, faktor pandemi tetap tidak dapat dikesampingkan sebagai penyebab masih kurangnya nilai tambah yang mampu dihasilkan setiap penduduk jika dibandingkan dengan sebelum pandemi.

4.2. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP NET EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk net ekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Kendari (diatas 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Kendari sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 13. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Net Ekspor Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT ADH Berlaku (<i>Juta Rp</i>)	10 274 067,15	11 238 384,42	12 284 748,05	12 372 526,04	12 936 486,79
Total Net Ekspor ADH Berlaku (<i>Juta Rp</i>)	(4 453 797,75)	(4 906 784,70)	(5 022 230,39)	(5 656 677,12)	(5 694 049,78)
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap Net Ekspor	- 2,31	- 2,29	- 2,45	- 2,19	- 2,27

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2,27 kali dari net ekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Dalam periode waktu 2017-2021, tren rasio konsumsi akhir rumah tangga

terhadap net ekspor berfluktuasi dan angkanya pada tahun 2021 menjadi -2,27. Kebijakan kepala-kepala daerah memberlakukan PSBB memengaruhi arus barang dan jasa dari dan ke Kota Kendari.

4.3. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Kendari digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT ADH Berlaku (Juta Rp)	10 274 067,15	11 238 384,42	12 284 748,05	12 372 526,04	12 936 486,79
Total PMTB ADH Berlaku (Juta Rp)	7 906 623,53	8 665 214,15	9 318 543,26	9 189 371,73	10 028 064,27
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap PMTB	1,30	1,30	1,32	1,35	1,29

Berbeda halnya terhadap net ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB memiliki kecenderungan meningkat, meskipun menjadi 1,29 pada tahun 2021. Perubahan yang tidak signifikan terjadi karena pola konsumsi rumah tangga tidak jauh berbeda dalam lima tahun terakhir.

4.4. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam

sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 75 persen). Tren lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan proporsi konsumsi akhir. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir dapat dipakai sebagai PMTB atau ekspor, walaupun memiliki peran yang relatif kecil. Tahun 2017, proporsi konsumsi akhir mencapai 82,03 persen terhadap PDRB dan memiliki kecenderungan naik hingga 85,07 persen di tahun 2020, tetapi menurun pada tahun 2021 yakni hingga sebesar 83,06 persen. Walaupun demikian, secara bersama-sama proporsi konsumsi akhir ketiga institusi pelaku ekonomi tersebut terus meningkat dan saling berkontribusi satu dan lainnya dalam menyokong perekonomian Kota Kendari.

Tabel 15. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Kendari, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADH Berlaku (Juta Rp)	15 308 687,39	16 795 864,94	18 355 746,08	18 754 155,10	19 661 885,56
a. Rumah Tangga	10 274 067,15	11 238 384,42	12 284 748,05	12 372 526,04	12 936 486,79
b. LNPRT	173 511,30	193 270,91	217 429,77	208 800,38	212 694,84
c. Pemerintah	4 861 108,95	5 364 209,61	5 853 568,25	6 172 828,69	6 512 703,92
PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)	18 664 137,00	20 285 726,42	22 153 506,64	22 045 697,95	23 670 769,29
Proporsi (%)	82,03	82,79	82,86	85,07	83,06

4.5. PERBANDINGAN NET EKSPOR TERHADAP PMTB

Net ekspor merupakan produk yang dikonsumsi di wilayah domestik dengan meniadakan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio Net ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk net ekspor yang dikonsumsi di wilayah domestik dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 16. Rasio Net Ekspor terhadap PMTB (ADH Berlaku) Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor ADH Berlaku (Juta Rp)	(4 453 797,75)	(4 906 784,70)	(5 022 230,39)	(5 656 677,12)	(5 694 049,78)
Total PMTB ADH Berlaku (Juta Rp)	7 906 623,53	8 665 214,15	9 318 543,26	9 189 371,73	10 028 064,27
Rasio Net Ekspor terhadap PMTB	- 0,56	- 0,57	- 0,54	- 0,62	- 0,57

Pada tahun 2017 sampai 2021, net ekspor mempunyai nilai yang lebih kecil dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital. Rasio net ekspor terhadap PMTB sejak tahun 2017 hingga 2021 masih berada dibawah nol. Artinya, produk residen belum cukup untuk memenuhi satu satuan pembentukan kapital tertentu di Kota Kendari.

4.6. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio
Kota Kendari, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADH Konstan (Juta Rp)	14 825 459,89	15 727 054,97	16 745 398,79	16 527 126,18	17 165 185,11
Perubahan (Juta Rp)	889 552,53	901 595,08	1 018 343,82	- 218 272,61	638 058,93
PMTB ADH Konstan (Juta Rp)	6 552 764,42	6 923 197,30	7 232 365,35	7 065 474,47	7 412 405,31
ICOR	7,37	7,68	7,10	NA	11,62

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

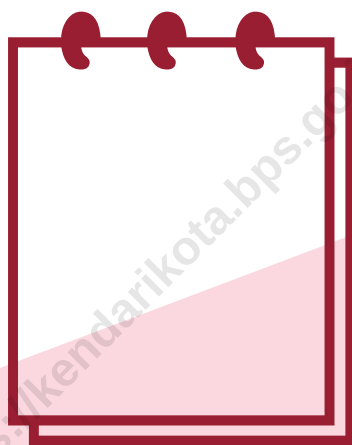
NA = Data tidak tersedia dikarenakan kurangnya sampel

Data pada tabel 17 di atas menunjukkan fluktuasi besaran ICOR dalam lima tahun terakhir. ICOR tahun 2021 bernilai positif mengikuti pertumbuhan ekonomi yang positif.

Dapat dikatakan bahwa investasi yang dihasilkan pada tahun 2021 kembali efisien setelah kejadian pandemi pada tahun 2020 sehingga sebagian barang modal/kapital kembali mengalami perbaikan atau diaktifkan kembali sebagaimana mestinya atau bahkan dibeli.

<https://kendarikota.bps.go.id>

LAMPIRAN



LAMPIRAN



1. PDRB Menurut Pengeluaran tahun 2017 s.d 2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Kendari pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017 s.d 2021, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb.) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB Menurut Pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi

makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Penyusunan Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran series 2017-2021 hanya memasukkan net ekspor sebagai komponen ekspor - impor antar daerah dan luar negeri.

<https://kendarikota.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA



**Lampiran 1. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	212,14	232,05	253,66	255,47	267,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	163,50	182,12	204,88	196,75	200,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	207,06	228,50	249,34	262,94	277,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	200,08	219,28	235,81	232,55	253,77
5. Perubahan Inventori	33,44	92,23	171,21	82,81	111,65
6. Net Ekspor	161,23	177,63	181,81	204,78	206,13
Indeks Perkembangan PDRB ADH Berlaku	227,75	247,54	270,33	269,02	288,85

**Lampiran 2. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(Persen)**

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	156,73	167,20	178,40	178,02	182,09
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	131,12	143,76	157,66	148,70	149,49
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	154,85	161,41	171,69	176,97	183,98
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	165,82	175,20	183,02	178,80	187,58
5.	Perubahan Inventori	9,91	67,53	115,10	44,92	48,06
6.	Net Ekspor	110,90	110,01	108,24	120,96	123,22
Indeks Perkembangan PDRB ADH Konstan		180,91	191,91	204,34	201,68	209,46

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(Persen)**

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,20	51,49	51,60	52,17	51,38
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,94	0,97	1,00	0,95	0,92
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24,52	24,09	24,07	25,14	25,16
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	44,20	44,02	43,19	42,75	43,18
5.	Perubahan Inventori	-0,19	-1,25	-2,00	-0,79	-0,82
6.	Net Ekspor	-20,67	-19,32	-17,85	-20,22	-19,83
Total		100.00	100.00	100.00	100.00	100,00

<https://kendarikota.bps.go.id/>

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Indeks Harga implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
(persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,59	2,54	2,45	0,93	2,22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,59	1,59	2,58	1,82	1,83
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,51	5,87	2,59	2,31	1,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,62	3,73	2,94	0,94	4,02
5. Perubahan Inventori	16,50	-59,54	8,91	23,94	26,00
6. Net Ekspor	11,11	11,06	4,03	0,78	-1,18
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB	2,80	2,46	2,57	0,83	3,38

PENUTUP



PENUTUP



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. , *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. , *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KENDARI***

Jl. Balai Kota II No. 97 Kendari, 93117
Telp. (0401) 3121776, 3111253 Fax. (0401) 3111253
Homepage : <http://kendarikota.bps.go.id>
E-mail : bps7471@bps.go.id

